



Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional dan Berintegrasi

Terwujudnya Pemerintahan yang efisien, Adil dan Berkinerja Tinggi
Indeks Tata Kelola dan Manajemen

Meningkatnya Kapasitas Aparatur Birokrasi
- Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo

Meningkatnya Budaya Digital dan Kepuasan Pengguna Layanan Digital Pemerintah
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan digital Pemerintah
- Indeks Kapasitas dan budaya digital

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Digital
- Nilai APSP
- Indeks Tata Kelola dan Manajemen
- Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah
- Indeks Teknologi Digital

Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral
Indeks Pengelolaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi

Meningkatnya Pengembangan inovatif untuk mendukung kinerja
- Jumlah pengembangan aplikasi internal berbasis inovasi

Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah
Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah

Meningkatnya kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika
Indeks SPBE/PEMDI

Tercapainya kolaborasi, integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Meningkatnya Dokumen kematangan inovasi daerah
Jumlah Dokumen Kematangan Inovasi Daerah Dinas Kominfo

Peningkatan Pelayanan Informasi Publik
Jumlah Informasi publik melalui PPID Pemerintah Kabupaten Pesir Selatan
Jumlah informasi Pemd di website Pemd (www.pesirselatan.kab.go.id)

Peningkatan Kerjasama penyebaran Informasi
Jumlah kerjasama melalui media elektronik dan konvensional

Literasi Digital Informasi publik Pemerintah Daerah
Persentase Kemampuan menggunakan media sosial tanpa melanggar hukum (UU ITE)

Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi
Jumlah sarana prasarana informasi yang tersedia (diseminasi)

Peningkatan sarana pengolahan data
Persentase pengembangan infrastruktur data yang terdistribusi sampai tingkat nagari

Peningkatan Pemanfaatan Aplikasi/Sistem Informasi
Jumlah aplikasi yang digunakan

Peningkatan jaringan komunikasi data
1. Jumlah Perangkat daerah, unit layanan/puskesmas/RS UD dan nagari terkoneksi dengan jaringan Smart City
2. Jumlah Pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi dan data

Meningkatnya Kualitas SDM Dinas Kominfo dibidang TIK
- Persentase Jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas TIK

Meningkatnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Kominfo

Peningkatan pemuktahiran data secara periodik
Jumlah data sektoral yang dipublikasikan melalui sistem informasi statistik daerah (SISDA) atau web resmi

Tersedianya data statistik sektoral perangkat daerah yang terdokumentasi secara lengkap dan terstandar.
Jumlah data statistik daerah yang terdokumentasi dengan metadata

Meningkatnya kualitas penyusunan data statistik sektoral sesuai kaidah statistik yang berlaku
Persentase data prioritas yang disusun dengan memenuhi prinsip kaidah statistik

Tersedianya tanggapan keamanan in
Jumlah pelati simulasi tanggapan keamanan in



CROSS CUTTING (EKPSDA, DPMPKR, BPNPAD,)

- KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH
- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 3) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 4) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 5) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 6) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 7) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 8) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 9) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 10) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 11) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 12) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 13) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 14) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 15) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 16) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 17) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 18) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 19) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 20) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 21) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 22) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 23) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 24) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 25) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 26) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 27) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 28) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 29) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 30) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 31) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 32) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 33) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 34) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 35) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 36) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 37) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 38) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 39) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 40) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 41) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 42) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 43) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 44) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 45) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 46) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 47) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 48) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 49) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 50) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 51) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 52) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 53) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 54) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 55) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 56) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 57) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 58) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 59) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 60) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 61) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 62) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 63) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 64) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 65) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 66) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 67) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 68) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 69) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 70) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 71) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 72) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 73) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 74) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 75) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 76) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 77) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 78) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 79) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 80) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 81) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 82) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 83) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 84) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 85) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 86) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 87) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 88) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 89) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 90) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 91) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 92) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 93) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 94) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 95) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 96) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 97) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 98) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 99) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
- 100) Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- KEGIATAN PENGELOLAAN E-GOVERNMENT DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/NOTA
- 1) Kondisi penyusunan dan tata letak arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
- 2) Pengembangan dan tata letak Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
- 3) Fasilitas penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemd
- 4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
- 5) Koordinasi penyelenggaraan Perif Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi
- 6) Fasilitas penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo
- 7) Koordinasi dan Fasilitas Pemroses Liris SPBE dan akses kolaborasi penyelenggaraan SPBE
- 8) Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE

- KEGIATAN PENYELANGGARAAN PENGAMANAN LINTAS PENGAMANAN INFORMASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/NOTA
- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- 3) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- 4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- 5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

- KEGIATAN PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KABUPATEN/NOTA
- 1) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
- 2) Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional
- 3) Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
- 4) Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia
- 5) Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

- KEGIATAN PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/NOTA
- 1) Nelaya Media
- 2) Kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
- 3) Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Kominfo di Daerah dalam Rangka Pelayanan
- 4) Pengelolaan Media Komunikasi Publik
- 5) Pelayanan Informasi Publik
- 6) Diakses Informasi
- 7) Penyusunan Konten
- 8) Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik

Jumlah pelatihan atau simulasi tanggapan insiden keamanan informasi



TUJUAN	Kondisi	Kondisi	Target	Target	Target	Target
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Indikator Indeks Tata Kelola dan Manajemen Kominfo	3,13	3,35	3,55	3,60	3,70	3,75
SASARAN ESEKON II						
Indikator	Kondisi	Kondisi	Target	Target	Target	Target
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Indeks Kapasitas dan Budaya Digital	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
2. Indeks Kapasitas dan Budaya Digital	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
3. Nilai APSP	A(86)	A(86,50)	A(86,65)	A(86,70)	A(86,800)	A(89)
4. Indeks Tata Kelola dan Manajemen Kominfo	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
5. Indeks Strategis dan Rencana	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
6. Indeks Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
7. Indeks Teknologi Digital	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
8. Indeks Penguasaan dan Pemertuan Data dan Informasi	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
9. Indeks Keamanan Siber	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
10. Indeks Audit Teknologi Digital	2,60	2,65	2,70	2,75	2,80	2,85
11. Nilai Kematangan Inovasi Dinas Kominfo	97	97	97	97	97	97
SASARAN ESEKON III						
Indikator	Kondisi	Kondisi	Target	Target	Target	Target
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap akses dan kualitas	80%	80%	80%	80%	80%	90%
2. Indeks SIG/EMIS	2	2,25	2,30	2,35	2,35	2,40
3. Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6
4. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	390	392	394	395	396	398
5. Jumlah pengembangan aplikasi internal berbasis inovasi	2	2	2	2	2	2
SASARAN ESEKON IV						
Indikator	Kondisi	Kondisi	Target	Target	Target	Target
	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Jumlah Informasi Publik melalui PPOD Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan	3000	3000	3000	3000	3000	3000
2. Jumlah Informasi Pemda di website Pemda (www.pesisirseltankab.go.id)	100	100	100	100	100	100
3. Jumlah kerjasama melalui media elektronik dan konvensional	40	40	40	40	40	40
4. Persentase Kemampuan penggunaan media sosial tanpa melanggar hukum (UU ITE)	30%	40%	50%	55%	65%	80%
5. Jumlah sarana prasarana informasi yang terakumulasi	3	3	3	3	3	3
6. Persentase pengembangan infrastruktur data yang terdapat tingkat nagari	30%	40%	50%	60%	70%	80%
7. Jumlah aplikasi yang digunakan	5	7	8	9	10	10
8. Jumlah Perangkat daerah, unit operasional/kelembagaan/RSUD dan nagari terkoneksi dengan jaringan Smart City	63	63	63	63	63	63
9. Jumlah Pengembangan dan perancangan aplikasi sistem informasi dan data	5	5	5	5	5	5
10. Persentase jumlah SDM yang mengikuti peningkatan kapasitas TIK	90	90	120	130	150	150
11. Jumlah Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dinas Kominfo	6	6	6	6	6	6
12. Jumlah data sektoral yang diupload melalui sistem informasi statistik daerah (SISDA) atau web resmi	100	300	442	450	450	450
13. Jumlah data statistik sektoral yang dihimpun dan terdokumentasi dengan metadata	50	50	50	50	50	50
14. Persentase data prioritas yang disusun dengan memenuhi prinsip sudah statistik	50%	50%	50%	50%	50%	50%
15. Jumlah pelatihan atau simulasi tanggap insiden keamanan informasi	2	2	2	2	2	2
16. Jumlah aplikasi yang sudah terintegrasi dengan tanda tangan digital	2	2	2	2	2	2

Painan, 20 Juni 2025
 KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
 KABUPATEN PESISIR SELATAN

